

BAB IV

KAJIAN TENTANG PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID RELASI ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan tokoh nasional, tokoh politik, tokoh demokrasi, budayawan dan guru bangsa yang berpengaruh terhadap percaturan politik di Indonesia. Yang diakui oleh dunia karena pemikirannya dan kepeduliannya terhadap tradisi/budaya, toleransi, hak asasi manusia

Konsep demokrasi yang digagas oleh Gus Dur lebih melaksanakan konkret nilai-nilai demokrasi diranah masyarakat, daripada praktik kelembagan demokrasi diranah formal kenegaraan. Demokrasi substantif inilah yang Gus Dur sebut dengan *demokrasi sebagai proses*, dan merupakan alternatif penyempurna bagi “demokrasi institusional”. Disebut alternatif, karena Gus Dur mengkritisi “demokrasi institusional”. Disebut penyempurna karena kritik itu tetap digerakan dalam kerangka penyempurnaan institusi demokrasi. Dalam demokratisasi tersebut, Gus Dur

menempatkan Mahkamah Konstitusional bagi kritik atas kesewenangan Negara.¹

Gus Dur beranggapan bahwa demokrasi itu harus utuh tidak hanya lembaga, tapi juga perilaku orangnya juga harus demokratis. Ada beberapa hal, yaitu: kebebasan berpendapat itu betul-betul dijamin undang-undang dasar menjamin. Tapi, justru kalau undang-undang itu membungkam sedangkan mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang untuk mengoreksi undang-undang, kemudian kebebasan berorganisasi/berserikat kebebasan berpergian masuk dan keluar negeri tanpa dikaitkan dengan masalah politik. Orang yang mengkritik pemerintah setajam apapun itu bukan alasan untuk “mencekal”. Cekal itu hanya diperuntukan bagi orang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal.²

Demokrasi jauh lebih penting lagi adalah bagaimana kita menjiwai nilai-nilai demokrasi sehingga proses dialog, musyawarah menjadi hal utama dalam menata pergaulan dan menata perekonomian, budaya, politik kita yang majemuk sehingga terjalin suatu hubungan yang saling menguntungkan. Gagasan substansi demokrasi sangat

¹ Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur* pergumulan Islam dan Kemanusiaan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), Cetakan I, h. 200.

² Abdurrahman Wahid, *Tabayun Gus Dur, Pribumisasi Islam Hak Minoritas Reformasi Kultural*, (Yogyakarta: LKiS, 1998), h. 11.

penting ketika persoalan hukum masih terpaku hal-hal prosedural yang ditinggalkan. Akhirnya, aspek keadilan yang menjadi spirit demokrasi hanya menjadi kerangka tanpa daging, tanpa darah dan tanpa ruh.³

Gus Dur juga di kenal dengan gerakan demokratisasi, menjunjung tinggi kebebasan beragama, keyakinan, berprofesi serta berpikir mengedepankan toleransi beragama dan menjaga komunikasi dengan kelompok agama yang berbeda, bagi Gus Dur ini sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, Pancasila, UUD1945, dan *maqosidusyariah* yang melindungi lima hal. Yaitu agama dan keyakinan, jiwa, akal, keturunan, dan harta atau hak milik. Gus Dur juga memperkenalkan suatu pendekatan baru terhadap budaya dan demokrasi yang berwawasan agama. Jadi, tidak mengherankan jika Gus Dur mendapat penghargaan dari Magsaysay Philipina. Lantaran dinilai telah berhasil memainkan peran penting sebagai integrator bangsa membangkitkan semangat kerukunan antar umat beragama. Dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap demokrasi dan bhineka tunggal ika.⁴

Menurut Gus Dur, Demokrasi keadaan tertentu yang memiliki beberapa ciri, antara lain harus bertumpu pada kadaulatan hukum dan memberikan perlakuan yang sama pada semua warga Negara di

³ Muhammad Rifai, *KH. Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*, (Yogyakarta: GARASI, 2016), h. 91.

⁴ Muhaimin Iskandar, *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Indonesia*, (Yogyakarta: Klikr, 2007), h.14.

hadapan undang-undang. Ini harus di tunjang oleh kemerdekaan berbicara, kebebasan berpikir dan sikap menghormati pluralitas pandangan. Lebih jauh lagi, ia berarti keharusan memelihara dan melindungi hak- hak pihak minoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi semua hal itu mengacu kepada kepentingan umum yaitu kepentingan bersama sebagai bangsa dan bernegara.

Dalam keadaan demokrasi itu berjalan sepenuhnya, orang tidak memiliki ketakutan akan berpendapat atau berkelakuan yang aneh-aneh. Kepentingan bangsa ditentukan oleh mayoritas pemberi suara dalam pemilihan umum yang diandaikan menjadi wahana kedaulatan rakyat.

Selain itu, menurut Gus Dur demokrasi juga mengisyaratkan beberapa hal, yaitu: *pertama*,, rasa tanggung jawab pada kepentingan bersama, *kedua*, kemampuan memiliki masa depan, dan *ketiga*, kesediaan berkorban bagi masa depan. Dan ini semua menurut Gus Dur membutuhkan adanya kerelaan, dan keinginan untuk melakukan sesuatu harus tanpa diberi imbalan karena ‘kerelaan’ inilah hakekat dari demokrasi. Jadi demokrasi adalah sesuatu yang dilakukan dengan sukarela.⁵

⁵Ma'mun Murod, *Menyikapi Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais Tentang Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 30.

Makna kebudayaan dalam pluralis kebudayaan, persoalan lain yang menjadi perhatian ulama dalam pemikiran Gus Dur adalah hubungan agama dan kebudayaan. Sebagaimana hubungan agama dan Negara masih problematik, bagi Gus Dur dalam konteks ke-indonesia-an hubungan antara agama, Negara, dan kebudayaan masih juga memunculkan masalah serius.

Dalam pandangan Gus Dur di dunia modern, demokrasi yang dapat mempersatukan keberagaman, kecenderungan, dan kekuatan-kekuatan bangsa. Demokrasi bisa merangkai yang terberai arah masing-masing kelompok menuju kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa sehingga akan menciptakan iklim pluralistic dan tumbuh suasana demokratis. *Keempat*, Gus Dur adalah penjaga tradisi/budaya, di mana menurut pandangannya, agama dan budaya bersifat saling melengkapi, agama sumber dari wahyu dan memiliki norma-norma sendiri. Sedangkan budaya adalah kreatifitas manusia, karenanya ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya. *Kelima*, menurut Gus Dur, Islam lebih efektif dan membumi jika berfungsi sebagai etika sosial. Kelima pemikiran di atas menunjukkan gagasan

Gus Dur sangat berlian dan modern yang bersumber dari nilai-nilai tradisional, agama, budaya, dan peradaban lain yang mencerahkan dan menciptakan masyarakat madani.⁶

Pada ranah kultural, Gus Dur menggagas pentingnya penghargaan terhadap pluralitas sebagai wujud penghargaan terhadap keragaman budaya, bahasa serta agama dalam Negara kesatuan republik Indonesia serta pemberdayaan masyarakat sipil yang pada akhirnya diharapkan akan mampu melakukan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan sebagai mekanisme demokrasi. Dari penolakan terhadap paham institusionalisme dalam konteks demokrasi, Gus Dur kemudian melakukan pada aspek infrastruktur demokrasi, yakni budaya keadaban (*civil culture*) yang menopang terjadinya demokratisasi, baik oleh Negara kepada rakyat maupun sebaliknya.

Tindakan menentang yang dilakukan Gus Dur untuk menunjukkan kepada minoritas di negeri ini bahwa suara mereka itu orang galak bukan representasi umat Islam. Tampak bahwa Gus Dur menjunjung tinggi nilai Islam dan berusaha agar orang tidak menaruh curiga terhadap Islam toleransi dan transparansi Gus Dur terhadap semua golongan menyebabkan bisa bergaul dengan semua kalangan mulai

⁶Muhaimin Iskandar, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*, (Yogyakarta: LKis, 2010), h.8-12.

kalangan nasionalis, tokoh agama, dan sosiallis. Keyakinan agama Gus Dur yang kuat sehingga tak pernah khawatir dan curiga terhadap niat jelek kelompok lain, pluralisme terjaka kalau ada demokrasi.⁷

Konsep Gus Dur ini mengarah pada definisi demokrasi sebagai apa yang dipikirkan masyarakat tentang demokrasi itu sendiri. Artinya, segala kelembagaan demokrasi seperti parlemen, pemetintahan eksekutif, hukum, dan pers, tidak akan mampu dan bahkan bisa menjadi musuh dari demokrasi, ketika demokrasi belum mampu merasuk dalam budaya masyarakat.⁸

Dalam menegakan demokrasi menurut Gus Dur tidak bisa menghindari pembicaraan yang kontroversi menurutnya adalah esensi demokrasi. Dari sini adalah tampak bahwa salah satu kepantasan apabila Gus Dur tetap konsisten membuat dan mengeluarkan berbagai pernyataan-pernyataan kontroversial yang sesungguhnya tidak boleh dikeluarkan oleh seorang presiden, tetapi karena adanya keyakinan bahwa peradaban dan kontroversi itu adalah hakekat dan esensi demokrasi, menurut Gus Dur dalam masyarakat demokrasi harus kontinyu dalam mensosialisasikannya sesungguhnya cermin dari sikap

⁷ Abdurrahman Wahid, *Islam, Pluralisme, dan Demokrasi, Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Perjuangan Strategi umat Model Gus Dur-Amien Rais* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 119.

⁸Masa Depan Demokrasi di Indonesia dan Kulturalisme Prespektif KH. Abdurrahman Wahid <https://nasional.kompas.com>(diakses pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 21:23)

konsistensinya pada nilai-nilai demokrasi. Gus Dur lebih setia kepada prinsip daripada cara, oleh karena kesetiaannya kepada prinsip ini, ia berani menentang cara-cara yang bertentangan pada prinsip lahiriah.

Kedaulatan hukum merupakan hal yang perlu diperjuangkan dalam menegakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa kedaulatan hukum yang dimaksud adalah perlakuan hukum yang sama terhadap semua elemen masyarakat.

Ada tiga hal pokok demokrasi yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Kebebasan adalah kebebasan individu sebagai warga Negara dan hak kolektif dari masyarakat. Keadilan merupakan landasan demokrasi, dalam arti terbuka peluang bagi semua komponen masyarakat untuk mengatur hidupnya sesuai kehendak masing-masing. Oleh karena setiap orang punya hak dan kesempatan untuk mengatur hidup dan kehidupannya sehingga harus diberi jalan mudah dan tidak dipersulit, seperti terjadi beberapa pada saat Orde Baru. Pokok demokrasi yang ketiga adalah *syura* atau musyawarah, bentuk atau cara memelihara dan memperjuangkan keadilan itu lewat jalur permusyawaratan.⁹

⁹ Abdurrahman Wahid, *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: LKPSM 1993), h. 90.

B. Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Demokrasi di Indonesia

Gus Dur menjadikan demokrasi sebagai sistem terbaik dari yang buruk. Posisi demokrasi yang fundamental ini bahkan menggantikan ideal Negara Islam di Indonesia, Gus Dur lebih memilih menegakan Negara-negara demokratis. Hal ini terjadi karena bagi Gus Dur demokrasi tidak hanya selaras dengan Islam, tetapi demokrasi atau prinsip musyawarah (*syura*) merupakan bagian dari nilai-nilai substantif Islam. Paradigma keIslaman tidak membutuhkan sistem Islami. Hal ini terjadi karena demokrasi di Indonesia berlandaskan supermasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Dua hal ini merupakan nilai dasar yang dihormati oleh Islam, sebab dengan keduanya, keadilan bisa ditegakkan. Gus Dur pun berangkat dari paradigma Islam. Paradigma keIslamannya selaras dengan demokrasi sebab supermasi hukum merupakan kondisi yang memungkinkan keadilan bisa terwujud, sementara keadilan tersebut merupakan nilai substantif Islam. Dengan demikian, jika tujuan umat Islam adalah keadilan, demokrasi berbasis hukum bisa diterima sebagai sistem yang Islami.¹⁰

¹⁰ Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h.196.

Demokratisasi politik di Indonesia pasca Orde Baru berjalan sangat cepat, bahkan paling cepat diantara negara-negara berkembang. Indonesia hanya butuh lima tahun untuk menerapkan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Demikian juga dalam penerapan prosedur-prosedur standar demokrasi modern yang lain.

Namun demokratisasi itu bukan tanpa persoalan. Ada paradox yang nyata dimana demokrasi prosedural jauh lebih menonjol ketimbang demokrasi substansial. Prosedur-prosedur dan simbol demokrasi memang bisa dibangun dengan cepat, tetapi kultur demokrasi tidak tumbuh semestinya. Penyampaian aspirasi dengan jalan kekerasan dan memaksakan kehendak justru marak terjadi. Penghormatan terhadap perbedaan keyakinan juga mengalami kemunduran, NU sebagai salah satu Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam proses demokratisasi bangsa. Sesuai dengan tradisinya yang mengakar secara kuat pada peradaban Islam di masa lalu dan kultur masyarakat yang ada.¹¹

Dalam kiprahnya di dunia sosial-politik Gus Dur adalah sosok yang kontroversial, yang tak sungkan berhadapan dengan arus keras yang menentangnya. Kenyataan ini berkaitan dengan *psycho-history*-nya yang tak jarang dipengaruhi pengalaman-pengalaman traumatik

¹¹ Muhaimin Iskandar, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2010.), h.135.

yang pernah dialaminya dan obsesi-obsesi di dalam dirinya yang memunculkan paradoks-paradoks tak kunjung habis. Eksistensi Gus Dur dalam kancah pemikiran Indonesia memang tidak bisa dinafikan lagi, langkah ini juga konsekuen dengan upaya rekonstruksi Gus Dur terhadap tradisi pemikiran serta hukum Islam yang sudah ada, yaitu dengan merubah paradigma menerima produk hukum metode berpikir ulama dahulu yang selalu berkuat pada kondisi masyarakat seluruh ruang pemikiran Gus Dur yang sangat identik kritisme dan radikal tentunya. Terutama kritik bagi politik pembangunan orde baru yang mengangkat ideologi-ideologi Negara yang melawan tradisionisme pesantren dan agama yang di presntasikan lewat NU.¹²

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan peranan wakilnya, sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Pemikiran Gus Dur tentang demokrasi tidaklah hanya persoalan bagaimana menjaganya secara prosedural. Hal tersebut memang penting, tetapi jauh lebih penting lagi adalah bagaimana menjiwai nilai-nilai demokrasi sehingga proses dialog, musyawarah menjadi hal utama dalam menata

¹²Penerbit Buku Kompas, *Gus Dur Santri par Excellence Teladan Sang Guru Bangsa*, (Jakarta: Kompas, 2010), h, 148.

pergaulan dan menata perekonomian, budaya, politik yang majemuk sehingga terjadi suatu hubungan yang saling menguntungkan. Gagasan demokrasi sangat penting ketika persoalan hukum masih terpaku hal-hal prosedural yang ditinggalkan. Akhirnya, aspek keadilan yang menjadi spirit demokrasi hanya menjadi kerangka tanpa daging, tanpa darah, tanpa ruh.¹³

Demokrasi. Kebebasan, keadilan, dan kesamaan di muka hukum juga bukanya tak haram, tetapi wajib dalam Islam. Tidak hanya berhenti pada tataran prosedural belaka demokrasi harus mampu mewujudkan keselamatan bagi rakyat, terutama mereka yang paling lemah, miskin, dan tertindas mencita-citakan umat Islam di Indonesia menjadi umat beragama yang berpandangan luas mampu memahami orang lain menumpahkan kebersamaan yang utuh dengan segala pihak, menjunjung tinggi kebebasan sebagai sarana demokrasi. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga Negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, dan asal muasal di muka undang-undang. Demokrasi mengajarkan kita untuk menghormati eksistensi parpol-parpol Islam, tetapi ini tidak berarti keharusan untuk mengikuti mereka di negeri kita demokrasi belum lagi

¹³Rifai, *KH. Abdurrahman Wahid...*,h. 91.

tegak dengan kokoh masih lebih berupa hiasan luar bersifat kosmetik daripada sikap yang melandasi pengaturan hidup yang sesungguhnya. Kalau tidak ada usaha sungguh-sungguh untuk menegakan demokrasi yang benar di negeri ini, tentu aspirasi-aspirasi itu akan tebendung oleh kekuatan-kekuatan demokrasi, dari sekarang sebenarnya telah dituntut dari kita keseriusan bersama untuk memeperjuangkan demokrasi yang hidup di negeri kita. Perjuangan itu haruslah di mulai kesediaan menumbuhkan moralitas baru dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang merasa terlibat dengan penderitaan rakyat di bawah.¹⁴

Gus Dur seorang muslim yang memiliki cakrawala pemikiran luas, menembus berbagai disiplin ilmu. Wawasannya luas tentang Islam, kemanusiaan, kebangsaan, kebudayaan, seni, dan lain-lain menyebabkan Gus Dur menjadi tokoh yang terhormat dimata International. Penghargaan-penghargaan akademik yang diberikan oleh berbagai perguruan tinggi yang di belahan dunia mengindikasikan bahwa dengan jelas gagasan dan pemikiran Gus Dur telah menyebar keberbagai penjuru sehingga beliau mendapat berbagai respon baik dari semua kalangan, baik akademisi, praktisi, dan lain-lain.¹⁵

¹⁴ M. Sulton Fatoni, Wijdan Fr, *The Wisdom Of Gus Dur*, (Depok: Imania, 2014), h. 158-159.

¹⁵ Abdul Wahid Hasan, *Gus Dur Mengarungi Jagat Spiritual Sang Guru Bangsa*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), h.142.

Perjalanan demokrasi membutuhkan evaluasi banyak hal tuntutan demokratis yang meniscayakan keadilan, transparansi, penghormatan terhadap hak asasi dan minoritas melorot jatuh kedalam. Demokrasi tidak memberikan sekedar kemenangan kepada yang banyak dan mengalahkan yang sedikit. Demokrasi tidak mengejar kemenangan dan menghindari kekalahan, tetapi bagi Gus Dur, demokrasi adalah perjuangan untuk terus-menerus menegakan keadilan bagi semua terutama bagi kalangan yang terpinggirkan.

Letak demokrasi dikukuhkan, nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan, keadilan, toleransi, pluralisme, dan dialog, sebenarnya tidak asing dalam tradisi agama nilai-nilai tersebut dapat ditemukan dengan mudah dalam teks-teks keagamaan maupun dalam sejarah. Gus Dur adalah penerus intelektual muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Majah dan Ibnu Rusyd yang memeberikan perhatian penuh kepada rasionalitas dan pentingnya politik keadilan yang digagas plato. Perjuangan demokrasi paling berat oleh Gus Dur adalah sepanjang tahun 1998, dimana reformasi mulai bergulir. Disaat kondisi bangsa mulai goyang Gus Dur berperan penting dengan memberikan sumbangan besar mulai mengeluarkan keprihatinan moral, memberikan masukan saat di undang presiden Soeharto hingga membentuk koalisi moral mendorong

terjadinya reformasi. Konsep dan gerakannya yang mengayomi seluruh elemen bangsa sungguh relevan di setiap ruang waktu dan kehidupan. Gus Dur mengonsep gerakannya dalam membangun keadilan dan toleransi bagi semua patut dilanjutkan dalam hal konsolidasi demokrasi.¹⁶

Negara butuh demokrasi, tetapi bukan demokrasi pasar yang hanya jual beli politik, pemimpin harus konsisten dengan kebenaran. Demokrasi hanya akan berkembang jika memiliki dasar budaya, di mana keberagaman pandangan dan pendapat sebagai suatu yang wajar dan diterima pemerintahan yang demokratis, ciri pokoknya adalah penggunaan cara-cara yang menentang kekerasan. Penafsiran liberalis dari hak-hak asasi manusia adalah bukan sebuah kebutuhan nyata rakyat di Negara berkembang mereka hanya membutuhkan sebuah penemuan identitas diri melalui serangkaian upaya sosial-ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup.¹⁷

Pemikiran demokrasi Gus Dur bisa di tempatkan pada gerbong demokrasi Substantif, melampaui demokrasi prosedural. Artinya, Gus Dur lebih memilih menekankan pelaksanaan kongkrit nilai-nilai demokrasi di ranah demokrasi, daripada praktik kelembagaan demokrasi di ranah

¹⁶Maman Imanulhaq Faqieh, *Fatwa dan Canda Gus Dur*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 163.

¹⁷Fatoni, *The Wisdom...*, h. 166.

formal kenegaraan. Demokrasi substantif inilah yang Gus Dur sebut dengan tema *demokrasi sebagai proses*, dan merupakan alternatif penyempurna bagi “demokrasi insitusional”. Disebut penyempurna karena kritik itu tetap di gerakan dalam kerangka penyempurnaan insitusi-insitusi demokrasi. Dalam demokrasi tersebut, Gus Dur menempatkan mahkamah konstitusi sebagai media institusional bagi kritik atas kesewenangan Negara.

Dalam kerangka jalinan pemikirannya, *demokrasi sebagai proses* bisa dilihat dari dua sudut pemikiran, yakni pemikiran sosial-politik dan pemikiran Islam. Dalam sosialpolitik, *demokrasi sebagai proses* merupakan *condition sine qua non* bagi terwujudnya hakikat kebudayaan, *human social life*. Mengapa, karena demokrasi sebagai proses di arahkan demi terpenuhinya hak-hak demokratis yang menjadi penanda bagi kehidupan sosial manusiawi hak-hak itu meliputi hak sipil-politik dan hak-hak sosial-ekonomi. Hak sipil-politik meliputi hak berekspresi, berserikat, dan berpartisipasi dalam politik. Sementara hak sosial-ekonomi merujuk pada hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama demi penyejahteraan kehidupan. Kesemua hak itu bisa terwujud hanya jika demokrasi dimaknai sebagai proses, bukan sebagai lembaga. Karena pemrosesan demokrasi berarti pemungisian lembaga dalam

kerangka perwujudan nilai-nilai demokrasi demi kehidupan politik demokratis. Dalam domain politik, kehidupan sosial manusiawi akhirnya tidak hanya merujuk pada terpenuhinya hak sosial-ekonomi, tetapi juga hak sipil-politik. Sebab semua lini kehidupan, termasuk politik, merupakan bagian sah dari kebudayaan¹⁸.

Islam moderat boleh diklaim siapa saja. Tapi, tidak ada yang menghindar dari nama Gus Dur sebagai Islam moderat Indonesia. Warga nahddiyin perlu bangga dengan hal ini.

Gus Dur diakui secara mendunia adalah wakil muslim moderat yang sering dirujuk dan dihargai. Pada masa hidupnya, latar belakang sebagai santri *par exelent* berhasil menamu kemoderenan dan keindonesiaan dalam wacana dan praksisi keIslaman merupakan prestasi yang sulit dicapai Gus Dur kerap kali langsung melontarkan ide tanpa berusaha payah melacak darimanaujung pangkalnya. Gus Dur adalah pencipta wacana ia diuntungkan karena mewakili basis masa Islam terbesar di Indonesia.

Gus Dur juga menyadari, situasi Negara tidak sama dengan pesantren. Selain karakter kekuasaan Negara yang regulative. Tersebar, kompleksitas persoalannya jauh lebih besar dan luas dibandingkan

¹⁸ Arif, *Humanisme Gus Dur...*, h.200.

dengan pesantren. Dalam pandangan Gus Dur, demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem yang menjamin kebebasan advokasi saja tetapi juga memiliki nuansa etis yang mampu menjaga lahirnya keadilan tanpa kekerasan.

Memanisme demokrasi membuka ruang dialog secara seimbang dan sejajar dari semua pihak, walaupun pada akhirnya tidak terjadi kesepakatan. Bagi Gus Dur, keputusan demokrasi tidak selamanya menuju pada suatu kesepakatan atau mufakat, tapi yang lebih tinggi adalah munculnya pemahaman dan penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Berangkat dari pengalaman pesantrennya, Gus Dur masih meyakini bahwa demokrasi akan dapat diwujudkan pada situasi dominative-hegemonik, dengan catatan jika masih terbuka ruang yang menentapkan manusia sebagai makhluk yang bebas dan berdaulat.¹⁹

Dalam hal-hal yang bertentangan dalam pandangan politik bisa dipersatukan dalam bingkai kemanusiaan. Rasa kemanusiaan inilah yang pada akhirnya memberikan titik temu dari segala pertentangan-pertentangan politik yang ada. Kebebasan juga harus disertai dengan etika, kalau tidak akan merugikan orang lain, tetapi kalau diatur-atur pemerintah lewat undang-undang nantinya malah akan salah sehingga

¹⁹ Ahmad, *Ijtihad politik Gus Dur*,, h. 314

yang dirugikan malah masyarakat sendiri dalam suatu Negara harus ada suatu hukum yang tidak membedakan agama, ras, dan keyakinan politik rakyatnya.²⁰

pada titik inilah Gus Dur merumuskan prasyarat keselarasan Islam dan demokrasi, sebagai berikut. Jelaslah dengan demikian, bahwa fungsi yang transformatif yang dibawa oleh agama bagi upaya demokratisasi kehidupan masyarakat, harus bermula dari informasi interen masing-masing agama. Untuk melakukan transformasi interen itu, agama harus merumuskan kembali pandangan-pandangannya mengenai martabat manusia, kesejajaran kedudukan manusia di muka UU Gus Dur dan solidaritas hakiki semua umat manusia. Melalui upaya ini, tiap agama akan mendudukan hubungan antar agama pada sebuah tataran baru. Tatanan baru itu adalah tahap pelayanan agama kepada warga masyarakat tanpa pandang bulu dan dalam bentuknya yang paling konkret seperti penanggulangan kemiskinan, penanggulangan kedaulatan hukum dan kebebasan menyatakan pendapat. Apabila sebuah agama telah memasuki tataran ini, barulah ia berfungsi melakukan pembebasan (*tahrir, liberation*). Jelaslah bahwa agama dapat memberikan sumbangan bagi proses demokratisasi, manakala ia sendiri berwatak membebaskan.²¹

²⁰Fatoni, *The Wisdom...*, h. 170.

²¹Abdurrahman Wahid, "Agama dan Demokrasi" Seri Dian II, *sepiritual Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*, (Yogyakarta:Institute Dian, 1994), h.5

Gus Dur mengisyaratkan pembebasan dari Islam agar Islam bisa menggerakkan demokratisasi. Watak pembebasan ini bisa dimiliki, hanya ketika umat Islam mampu duduk di tataran baru, yakni ditataran kemanusiaan yang membuatnya menjadi agama pelayan masyarakat tanpa pandang “bulu agama”. Tataran baru ini akan memunculkan pluralisme agama dalam rangka perjuangan kemanusiaan. Artinya Islam bersanding dengan agama-agama lain, Islam harus melakukan transformasi internal atas pandangan keislaman. Dari pandangan Islam legal-formalistik menjadi pandangan Islam substantif. Dari pandangan Islam relatif-kultural, menjadi pandangan Islam humanis-universal. Transformasi internal pandangan keislaman ini syarat bagi peran transformatif Islam di ranah kemasyarakatan sehingga ia bisa aktif dalam perjuangan demokratisasi.²²

Penolakan Gus Dur hebat atas “demokrasi seolah-olah”, menggambarkan keengganannya atas hegemoni situasi politik yang memberangus nilai-nilai substantif demokrasi, oleh lembaga manipulasi

Dalam kerangka inilah demokrasi akhirnya mensyaratkan *pribumisasi Islam*. Sebab, keselarasan Islam dan demokrasi bisa terjadi dalam kerangka *pribumisasi Islam*. Hanya saja, dalam konteks demokrasi, terdapat dua lapis persyaratan keislaman. Pertama, *pribumisasi Islam*, sehingga Islam tidak lagi berkuat pada pertarungan

²²Arif, *Humanisme...*, h. 199

simbolik antara agama-hukum dan budaya. Peleraian ketegangan ini yang membuahkan perjuangan substantif keislaman, salah satunya perjuangan demokrasi. Kedua, penaikan nilai-nilai Islam, dari nilai keislaman dalam kerangka relativisme kultural kepada nilai kemanusiaan universal. Pada titik ini universal kemanusiaan telah menjadi bagian dari perinsip dasar keislaman Gus Dur sendiri hingga Gus Dur akhirnya memang telah memenuhi dua syarat tersebut demi peran serta Islam dalam demokratisasi kehidupan politik.²³

Dengan melihat unsur-unsur yang diperlukan bagi sebuah upaya rekonstruksi teori kenegaraan dari sudut pandang kontemporer saat ini, tampak bahwa lahan bagi rekonstruksi serupa dari sudut pandang Islam, tidak begitu menguntungkan. Solidaritas massa, cenderung untuk menolak setiap pemecahan masalah dalam kerangka sikap inklusifistik. Demikian juga, kehidupan kaum spiritual muslimin, yang sangat tipis kadar kontemplasinya karena didorong oleh kebutuhan pencarian ‘pemecahan praktis’ (*hulul ‘amaliyah, implementable solutions*), sangat sedikit memberikan peluang untuk kiprah pemikiran yang berwawasan sangat jauh,²⁴

²³Arif, *Humanisme...*, h. 202

²⁴Abdurrahman Wahid, “Masih Relevankah Teori Kenegaraan Islam? Tinjauan kontemporer Atas Prinsip-prinsipRekonstruksinya”, *Makalah Pada Diskusi Konsep Islam, FH-UII*, (Yogyakarta, 7 Februari 1998), h. 4

Ketidak setujuan Gus Dur terhadap teori kenegaraan Islam, serta usaha rekontruksi atasnya, bukan semata disebabkan oleh sistem Islami itu sendiri, tetapi sebuah fakta historis yang memperlihatkan bahwa gelora pengislaman Negara, ternyata hanya memasukan Islam kedalam fanatisme ideologis, yang tentunya tidak berperan sebagai agama.

Fanatisme melahirkan dua sikap yang sma-sama membahayakan Islam sebagai agama. Di satu sisi, Islam telah dijadikan alternatif ideologis berupa doktrin politik: *Islam sebagai solusi*, yang tentunya menyimpan potensi konflik dengan “solusi lain” yang ditempatkan sebagai *jahiliyah modern alih-alih* menciptakan masalah, gelora serba alternatif ini pasti akan menggerat masa kedalam pertarungan ideologis, seiring dengan ceceran darah sesama muslim.

Mengembangkan keyakinan agama serta mengajarkan ajaran spiritualitas tanpa ada pembatasan, selama tidak menjurus kriminalitas jaminan akan kebebasan melakukan kegiatan ilmiah perlindungan hukum atas karya-karya ilmiah, dari tindakan sepihak oleh tindakan otoritas, termasuk otoritas agama, diluar saluran pengadilan. Pada ranah praktis, hal inilah yang membuat Gus Dur, menerima azaz tunggal pancasila sebagai azaz organisasi masyarakat. Karena

disamping hal tersebut merupakan keberpihakan dari ormas-ormas untuk mencoba keluar dari kepentingan sektarian.

Dalam pemikiran Gus Dur menolak keras politisasi agama yang sering kali menjadi tempat persembunyian kepentingan-kepentingan politik sesaat, dalam konteks ini Gus Dur muncul dengan gagasan Islam sebagai faktor komplementer kehidupan sosial budaya dan politik Indonesian pribumisasi Islam. Dengan gagasan ini, Gus Dur mengajak komunitas Islam untuk mempromosikan sebagai faktor komplementer dalam pembentukan struktur sosial, budaya, dan politik Indonesia, bukan sebagai pemberi warna tunggal yang hanya akan mengantarkan Islam sebagai faktor *divise* di sini Gus Dur memberikan gambaran yang jelas tentang rendahnya keagaan umat Islam. Dalam pemikirannya, Gus Dur bisa dikatakan sangat kontroversial mengingat apa yang telah dilakukan selalu membingungkan terutama dikalangan masyarakat awam yang kebanyakan dari kalangan NU itu sendiri dibawah komando Gus Dur cenderung menarik diri dan memilih kembali ke *khittoh*²⁵

Gus Dur menyadi bahwa syari'at Islam memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterapkan oleh Negara, tanpa harus mengklaim

²⁵ Santoso, *Teologi Politik...*, h. 243

dirinya sebagai Negara agama (Islam). Klaim-klaim identitas yang di perankan oleh Negara justru akan cenderung akan memihak kepada mayoritas dengan menekan minoritas. Dalam pandangannya, syari'at memiliki nuansa etnis berupa pembelaannya terhadap hak-hak dasar manusia.²⁶

²⁶Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis...*,h. 318.